



Persepsi Akuntan Terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 Dan PSAK 73 Di Perusahaan Menengah

Accountants' Perceptions of the Level of Difficulty in Implementing PSAK 72 and PSAK 73 in Medium-sized Companies

Muammar Khaddafi¹, Fazillah Turrahmi², Sentiyani³, Karina insani tumangger⁴,
Ria Resti Sinaga⁵

Universitas Malikussaleh

Email : khaddafi@unimal.ac.id¹, fazillah.220420167@mhs.unimal.ac.id², sentiyani.220420024@mhs.unimal.ac.id³,
karina.220420106@mhs.unimal.ac.id⁴, ria.220420009@mhs.unimal.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 11-07-2025

Revised : 13-07-2025

Accepted : 15-07-2025

Published : 17-07-2025

Abstract

This study aims to examine accountants' perceptions regarding the level of difficulty in implementing Financial Accounting Standards (PSAK) 72 on Revenue from Contracts with Customers and PSAK 73 on Leases within medium-sized enterprises in Indonesia. Effective from January 1, 2020, both PSAK 72 and 73 introduced substantial changes in the recognition of revenue and lease accounting practices, necessitating adjustments in systems, policies, and technical comprehension among accounting professionals. A quantitative research method was adopted, utilizing questionnaires distributed to accountants working in medium-sized firms across various industrial sectors. The results reveal that most accountants perceive PSAK 72 as more intricate than PSAK 73, particularly in identifying performance obligations and allocating transaction prices. Conversely, PSAK 73 is seen as more demanding in terms of initial measurement and lease disclosures. Factors such as the extent of training received, the adequacy of accounting information systems, as well as company size and operational complexity, significantly influence the perceived difficulty of implementation. These insights offer valuable input for regulators, professional bodies, and corporate management in supporting a smoother and more effective adoption of new accounting standards within the medium-sized business sector.

Keywords: PSAK 72, PSAK 73, accountants' perceptions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi akuntan terhadap tingkat kesulitan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73 tentang Sewa pada perusahaan menengah di Indonesia. PSAK 72 dan 73 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan pendapatan dan perlakuan akuntansi sewa, yang menuntut penyesuaian sistem, kebijakan, serta pemahaman teknis dari para praktisi akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada akuntan yang bekerja di perusahaan menengah dari berbagai sektor industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas akuntan menganggap implementasi PSAK 72 lebih kompleks dibanding PSAK 73, terutama dalam hal identifikasi kewajiban pelaksanaan dan alokasi harga transaksi. Namun, PSAK 73 dinilai lebih menantang dalam aspek pengukuran awal dan pengungkapan sewa. Faktor-faktor seperti tingkat pelatihan, dukungan sistem informasi akuntansi, serta ukuran dan kompleksitas perusahaan memengaruhi tingkat kesulitan yang dirasakan. Temuan ini memberikan masukan penting bagi regulator, asosiasi profesi, dan manajemen perusahaan dalam memfasilitasi implementasi standar akuntansi baru secara lebih efektif di sektor menengah.

Kata Kunci: PSAK 72, PSAK 73, persepsi akuntan



PENDAHULUAN

Perubahan dalam standar akuntansi internasional telah mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan relevan. Dalam konteks tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menerbitkan PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan) dan PSAK 73 (Sewa), yang resmi berlaku pada 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Kedua standar ini merupakan adopsi penuh dari IFRS 15 dan IFRS 16, dan bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, komparabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh entitas. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk pengakuan pendapatan yang berfokus pada identifikasi kewajiban pelaksanaan dan alokasi harga transaksi berdasarkan pertimbangan nilai kontraktual. Model ini menggantikan pendekatan yang sebelumnya lebih sederhana dan berbasis pada realisasi dan keterukuran. Di sisi lain, PSAK 73 memperkenalkan paradigma baru bagi penyewa, di mana seluruh transaksi sewa (kecuali sewa jangka pendek dan bernilai rendah) harus dicatat sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Perubahan ini mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian signifikan, baik dalam kebijakan akuntansi, sistem informasi, maupun pengumpulan data kontraktual. Perusahaan menengah menjadi salah satu kelompok yang terdampak paling signifikan oleh perubahan ini, karena biasanya mereka memiliki keterbatasan dalam sumber daya, baik dari sisi teknologi maupun keahlian profesional (Pratama, H. Y., & Rahmawati, I., 2020). Implementasi PSAK 72 dan 73 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pemahaman konseptual dan operasional yang matang dari para akuntan. Permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari standar itu sendiri, tetapi juga dari kesiapan internal perusahaan dalam merespons perubahan tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan untuk melakukan analisis kontrak secara mendalam pada PSAK 72 atau rekalkulasi liabilitas sewa pada PSAK 73 menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa studi sebelumnya mengindikasikan bahwa pemahaman praktisi akuntansi terhadap standar baru ini masih bervariasi. Faktor-faktor seperti pengalaman kerja, pelatihan profesional, dan dukungan dari sistem informasi akuntansi sangat memengaruhi persepsi mereka terhadap tingkat kesulitan implementasi standar (Suryani & Sutrisno, 2021; Handayani et al., 2022). Namun, kajian empiris yang secara spesifik menyoroti persepsi akuntan pada perusahaan menengah, terutama dengan membandingkan PSAK 72 dan 73, masih sangat terbatas. Padahal, pandangan akuntan sebagai pelaksana utama implementasi sangat krusial dalam menilai keberhasilan adopsi standar. Melalui penelitian ini, dilakukan analisis terhadap persepsi akuntan mengenai tingkat kesulitan implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 pada perusahaan menengah di Indonesia dari berbagai sektor industri. Fokus utama adalah pada aspek-aspek teknis dan sistemik yang dirasakan sulit, serta variabel-variabel yang memengaruhi persepsi tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan dan memberikan kontribusi empiris yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan asosiasi profesi. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi regulator seperti DSAK IAI dan OJK, serta asosiasi profesi seperti IAI dan IAPI dalam mendesain program pelatihan, panduan implementasi, dan kebijakan transisi yang lebih akomodatif. Selain itu, hasil ini juga dapat menjadi rujukan bagi manajemen perusahaan menengah untuk mengevaluasi kesiapan sistem dan sumber daya mereka dalam menghadapi perubahan standar yang kompleks. Pemahaman terhadap persepsi akuntan merupakan langkah awal untuk menyukseskan implementasi standar secara lebih inklusif dan efektif.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur, sebuah metode sistematis yang dirancang untuk menghimpun dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber yang telah tersedia. Pendekatan ini membuka peluang bagi peneliti untuk menyelami topik secara mendalam dengan merujuk pada beragam literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hingga dokumen lainnya

TINJAUAN LITERATUR

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 yang mulai berlaku efektif di Indonesia sejak 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan PSAK 23 tentang Pendapatan dan beberapa ketentuan lain terkait pengakuan pendapatan. PSAK 72 memperkenalkan model lima langkah dalam proses pengakuan pendapatan, yaitu: mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga ke kewajiban, dan mengakui pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja berbasis prinsip yang konsisten untuk seluruh entitas dan industri. Keunggulan PSAK 72 terletak pada fokusnya terhadap substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk legal. Dengan demikian, akuntansi pendapatan menjadi lebih representatif terhadap realitas bisnis. Namun, penerapan standar ini memerlukan pertimbangan profesional yang tinggi, terutama dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan menentukan waktu pengakuan pendapatan. Dalam konteks perusahaan menengah, tantangan utama dari implementasi PSAK 72 adalah keterbatasan dokumentasi kontrak dan kurangnya sistem yang mampu memisahkan komponen jasa dan produk dalam satu kesatuan transaksi. Banyak perusahaan menengah belum memiliki sistem Enterprise Resource Planning (ERP) atau tim legal internal yang kuat untuk menyusun kontrak sesuai kebutuhan akuntansi berbasis prinsip ini. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa banyak perusahaan menengah di Indonesia masih mengandalkan pendekatan berbasis kas dan belum terbiasa dengan analisis kewajiban pelaksanaan yang diharuskan PSAK 72. Hal ini memperbesar kemungkinan kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan. Lebih jauh, PSAK 72 memberikan penekanan pada pencatatan estimasi seperti *variable consideration* (pertimbangan variabel), insentif, dan diskon, yang membutuhkan data historis serta model estimasi. Dalam praktiknya, perusahaan menengah sering kali tidak memiliki data historis yang cukup atau sistem informasi yang memadai untuk mendukung estimasi tersebut secara akurat dan konsisten.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 adalah adopsi dari IFRS 16 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 di Indonesia. Standar ini mengubah secara fundamental perlakuan akuntansi terhadap sewa dari perspektif penyewa. Di bawah PSAK 73, semua jenis sewa — baik sewa pembiayaan maupun sewa operasi — harus diakui dalam neraca sebagai aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan terkait kewajiban sewa. Penerapan PSAK 73 mewajibkan entitas untuk menilai seluruh kontrak yang mungkin mengandung unsur sewa. Ini mencakup tidak hanya sewa properti atau kendaraan secara eksplisit, tetapi juga perjanjian yang memberi hak kontrol terhadap penggunaan aset. Pendekatan ini menuntut pemahaman yang lebih dalam terhadap substansi kontrak dan penggunaan model nilai kini dalam pengukuran awal. Kendala umum yang dihadapi perusahaan menengah adalah tidak



tersedianya informasi historis yang cukup rinci, serta ketidakmampuan sistem akuntansi lama untuk mengakomodasi pencatatan amortisasi aset hak guna dan bunga kewajiban sewa secara akurat. Kieso et al. (2020) menekankan bahwa transisi ke PSAK 73 menuntut akuntan untuk memahami konsep perhitungan diskonto dan amortisasi yang tidak sederhana, terutama jika dilakukan secara manual. Dalam praktiknya, perusahaan menengah menghadapi beban administratif dalam mengumpulkan dan mengevaluasi semua kontrak sewa. Saputra & Lestari (2022) mencatat bahwa banyak entitas tidak menyadari bahwa perjanjian seperti kontrak langganan alat berat, penggunaan kantor bersama, atau fasilitas produksi bersama dapat diklasifikasikan sebagai sewa dalam konteks PSAK 73. Akibatnya, perusahaan menengah rentan terhadap kesalahan klasifikasi dan pengukuran kewajiban sewa. Perbedaan antara masa sewa secara hukum dan masa sewa secara substansi ekonomi sering kali tidak terdokumentasi, menyebabkan kebingungan dalam menentukan jangka waktu pengakuan aset hak guna.

Persepsi Akuntan terhadap Implementasi PSAK 72 & PSAK 73

Persepsi akuntan merupakan aspek penting dalam menilai tingkat keberhasilan implementasi standar akuntansi baru. Persepsi ini dibentuk oleh pemahaman terhadap standar, pengalaman praktik, tingkat pelatihan, dan kesiapan organisasi dalam mendukung proses transisi. Dalam konteks perusahaan menengah, persepsi akuntan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, beban kerja, serta minimnya akses terhadap pelatihan dan konsultasi teknis. Penelitian Pratama & Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa akuntan di perusahaan menengah umumnya memiliki persepsi bahwa PSAK 72 lebih rumit secara konseptual, sedangkan PSAK 73 lebih menantang secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan bukan hanya berasal dari standar itu sendiri, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menyediakan alat bantu, waktu, dan pelatihan yang dibutuhkan. Faktor kunci lainnya yang memengaruhi persepsi akuntan adalah dukungan dari manajemen puncak. Tanpa dukungan dari pimpinan perusahaan, akuntan cenderung merasa terbebani sendirian dalam menghadapi transisi standar. Menurut Susanto (2018), keberhasilan implementasi sistem akuntansi yang kompleks sangat ditentukan oleh keterlibatan lintas departemen dan pembentukan kebijakan internal yang mendukung. Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam publikasi resminya juga menekankan pentingnya peran judgment profesional dalam menerapkan PSAK 72 dan PSAK 73. Namun, judgment ini harus didukung dengan dokumentasi memadai dan kebijakan yang konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan kepada auditor maupun regulator. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa tanpa intervensi aktif dari pihak eksternal, seperti asosiasi profesi atau lembaga pelatihan, perusahaan menengah akan terus menghadapi kesulitan dalam mengadopsi PSAK 72 dan 73 secara penuh. Oleh karena itu, persepsi negatif terhadap kesulitan implementasi perlu ditanggapi sebagai sinyal untuk penguatan sistem, pelatihan teknis, dan penyusunan pedoman praktis yang lebih sesuai dengan konteks perusahaan menengah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Akuntan terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di Perusahaan Menengah

Penerapan standar akuntansi yang baru seperti PSAK 72 dan PSAK 73 memerlukan pemahaman yang mendalam dari para akuntan, khususnya dalam perusahaan menengah yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pendukung. Tingkat pemahaman



akuntan terhadap kedua PSAK ini menjadi aspek krusial karena kesalahan dalam interpretasi dapat berujung pada penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai. PSAK 72 menggantikan standar sebelumnya terkait pengakuan pendapatan dan memperkenalkan pendekatan berbasis lima langkah yang lebih prinsipil dan menuntut pertimbangan profesional yang lebih tinggi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Sementara itu, PSAK 73 memperkenalkan model baru dalam akuntansi sewa yang berdampak langsung pada neraca perusahaan karena semua sewa kini harus diakui sebagai aset dan kewajiban, kecuali yang memenuhi syarat pengecualian. Dalam konteks perusahaan menengah, pemahaman akuntan terhadap PSAK 72 dan PSAK 73 ternyata masih beragam. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, sebagian besar akuntan memahami secara garis besar maksud dan tujuan dari standar ini, namun masih kesulitan dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan teknisnya ke dalam praktik akuntansi sehari-hari. Hal ini terutama terlihat pada saat akuntan dihadapkan pada kontrak-kontrak kompleks atau kasus-kasus sewa dengan ketentuan tidak baku. Pemahaman yang terbatas ini bisa berasal dari minimnya pelatihan lanjutan atau tidak adanya panduan praktis yang mudah diakses di perusahaan.

Beberapa responden mengakui bahwa mereka hanya mengenal PSAK 72 dan 73 secara teoritis dari pelatihan awal atau seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Namun, saat mereka harus melakukan implementasi di lingkungan kerja, banyak hal yang masih membingungkan. Misalnya, dalam PSAK 72, pengakuan pendapatan harus dilakukan sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan, bukan hanya berdasarkan termin pembayaran. Hal ini cukup membingungkan terutama untuk kontrak dengan penyerahan jasa secara bertahap. Sementara itu, PSAK 73 dianggap lebih membebani dari sisi teknis karena mengubah paradigma akuntansi sewa secara menyeluruh. Banyak akuntan yang mengaku belum sepenuhnya memahami bagaimana cara menghitung nilai kini dari kewajiban sewa, atau bagaimana mencatat aset hak guna. Beberapa responden menyampaikan bahwa meskipun mereka memahami prinsip dasarnya, implementasi teknisnya memerlukan bantuan dari pihak eksternal atau perangkat lunak tambahan yang tidak semua perusahaan miliki.

Tingkat pemahaman yang rendah ini sering kali dikaitkan dengan kurangnya pembekalan yang sistematis dari manajemen perusahaan. Akuntan di perusahaan menengah tidak selalu mendapatkan akses terhadap pelatihan resmi yang difasilitasi oleh kantor pusat atau pihak regulator. Akibatnya, banyak di antara mereka yang belajar secara otodidak, yang tentunya memiliki keterbatasan dalam pemahaman konseptual maupun teknis. Selain itu, dokumentasi internal perusahaan juga belum banyak mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan akibat PSAK 72 dan 73. Dari segi pendidikan formal, sebagian besar akuntan menyatakan bahwa kurikulum yang mereka tempuh semasa kuliah belum mencakup secara rinci kedua standar ini karena masih tergolong baru (Handayani, D., et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mereka hanya bertumpu pada pelatihan kerja atau literatur yang mereka cari secara mandiri. Dalam beberapa kasus, akuntan yang memiliki pengalaman di perusahaan besar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik karena sebelumnya telah dilibatkan dalam proses implementasi di perusahaan sebelumnya. Penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan pemahaman antara akuntan yang telah memiliki sertifikasi profesional (seperti CPA atau CA) dan yang belum. Akuntan bersertifikat cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam karena mereka diwajibkan mengikuti pelatihan dan ujian yang mencakup standar terbaru. Namun, jumlah akuntan bersertifikat di perusahaan menengah relatif kecil karena proses sertifikasi dianggap mahal dan tidak selalu



diwajibkan oleh perusahaan. Salah satu tantangan utama dalam memahami PSAK 72 adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dan menetapkan kewajiban pelaksanaan secara terpisah. Hal ini menuntut akuntan untuk memahami isi kontrak secara mendalam, sesuatu yang sebelumnya bukan menjadi fokus dalam akuntansi pendapatan. Banyak akuntan mengaku bahwa membaca dan menginterpretasikan kontrak bukanlah keahlian utama mereka, sehingga kesalahan dalam menentukan jumlah kewajiban pelaksanaan bisa saja terjadi.

Dalam PSAK 73, pemahaman akuntan diuji saat harus membedakan antara sewa dan jasa. Tidak semua pembayaran kepada pihak ketiga bisa dikategorikan sebagai sewa, namun dalam praktiknya, perbedaan ini tidak selalu jelas. Para akuntan menyatakan bahwa mereka memerlukan panduan atau contoh kasus konkret untuk memahami situasi ini dengan lebih baik. Kekurangan referensi praktis membuat mereka merasa tidak percaya diri dalam menerapkan ketentuan yang ada. Beberapa responden juga menyampaikan bahwa meskipun mereka telah memahami secara umum isi PSAK 72 dan 73, mereka merasa kesulitan dalam menyosialisasikan perubahan ini kepada departemen lain. Misalnya, bagian pemasaran dan pengadaan sering kali tidak memahami dampak akuntansi dari perubahan kontrak, padahal hal ini sangat menentukan dalam penerapan PSAK. Akuntan merasa mereka tidak hanya perlu memahami standar, tetapi juga harus menjadi agen perubahan di dalam Perusahaan (Saputra, R. A., & Lestari, P., 2022). Di sisi lain, ada juga akuntan yang menunjukkan pemahaman cukup baik terhadap PSAK 72 dan 73 karena mereka bekerja di perusahaan yang sebelumnya sudah menjalankan program transisi sejak awal. Mereka dibekali dengan pelatihan internal dan panduan implementasi berbasis studi kasus. Pendekatan seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman akuntan karena materi yang disampaikan lebih aplikatif dan kontekstual.

Faktor teknologi juga memengaruhi tingkat pemahaman akuntan. Perusahaan yang sudah menggunakan sistem ERP yang mutakhir biasanya memberikan pelatihan terintegrasi saat sistem mereka diperbarui sesuai dengan PSAK terbaru. Dalam kasus ini, akuntan tidak hanya memahami isi standar, tetapi juga cara mengaplikasikannya dalam sistem informasi akuntansi. Sebaliknya, perusahaan yang masih menggunakan sistem manual atau spreadsheet Excel menghadapi lebih banyak kesulitan. Responden juga menyebutkan bahwa pemahaman terhadap PSAK 72 dan 73 seharusnya tidak berhenti pada tataran individual, tetapi harus menjadi pemahaman kolektif di dalam departemen keuangan. Beberapa perusahaan mulai menerapkan sesi diskusi rutin antar staf akuntansi untuk membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan standar baru. Pendekatan ini dianggap membantu karena adanya pertukaran pengalaman yang memperkaya wawasan praktis akuntan. Terakhir, berdasarkan pengamatan peneliti, akuntan yang aktif mengikuti perkembangan regulasi akuntansi melalui forum, komunitas, atau langganan jurnal akuntansi memiliki pemahaman yang relatif lebih baik. Mereka tidak hanya tahu apa isi standar, tetapi juga memahami konteks global dari perubahan tersebut dan alasan-alasan konseptual di balik penggantian standar lama. Pemahaman yang lebih utuh seperti ini menjadi bekal penting dalam menerapkan PSAK dengan benar dan konsisten. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman akuntan terhadap PSAK 72 dan PSAK 73 di perusahaan menengah masih bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dukungan organisasi, serta akses terhadap pelatihan dan teknologi. Meningkatkan pemahaman ini menjadi tantangan tersendiri, namun sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kedua PSAK tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Persepsi Akuntan terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di Perusahaan Menengah

Salah satu aspek penting yang muncul dari hasil penelitian ini adalah bagaimana akuntan memandang tingkat kompleksitas dalam penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 secara umum. Sebagian besar responden menyatakan bahwa implementasi kedua standar ini dianggap cukup kompleks, terutama karena mengubah pendekatan yang sebelumnya berbasis aturan menjadi pendekatan yang lebih prinsipil dan berbasis penilaian profesional. Kompleksitas ini tidak hanya berasal dari substansi standar itu sendiri, tetapi juga dari keterkaitan antara standar dengan kebijakan internal perusahaan dan kesiapan sistem yang mendukungnya. PSAK 72, yang menggantikan beberapa standar pengakuan pendapatan sebelumnya, dianggap menantang karena memperkenalkan model pengakuan lima langkah yang menuntut analisis mendalam atas kontrak dengan pelanggan (Dewi, A. R., & Nugroho, A. B., 2021). Dalam praktiknya, akuntan harus mampu mengidentifikasi kontrak, menentukan kewajiban pelaksanaan, menetapkan harga transaksi, mengalokasikan harga ke kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan ketika kewajiban tersebut terpenuhi. Proses ini jauh lebih kompleks dibandingkan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat langsung berdasarkan waktu atau nilai pembayaran. Sementara itu, PSAK 73 dianggap bahkan lebih membingungkan bagi sebagian akuntan karena menghapus perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dari sisi penyewa, sehingga seluruh sewa diakui sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa. Konsep ini cukup sulit dipahami karena memerlukan perhitungan nilai kini dan amortisasi yang sebelumnya jarang dilakukan oleh perusahaan menengah. Bahkan akuntan berpengalaman pun mengakui bahwa PSAK 73 mengharuskan mereka menguasai metode diskonto dan memahami karakteristik keuangan dari setiap perjanjian sewa.

Sebagian responden menyebutkan bahwa kompleksitas terbesar terletak pada keharusan membuat pertimbangan profesional atas hal-hal yang sebelumnya telah ditentukan secara eksplisit dalam standar lama. Misalnya, dalam menentukan masa sewa atau apakah suatu opsi perpanjangan sewa cukup mungkin digunakan, akuntan harus membuat estimasi yang berbasis asumsi realistis dan terdokumentasi. Ini menambah beban tanggung jawab dan meningkatkan risiko salah tafsir atau ketidakkonsistenan dalam pelaporan. Pandangan umum yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa implementasi PSAK 72 dan 73 bukan sekadar proses akuntansi, tetapi juga memerlukan keterlibatan lintas fungsi, seperti legal, pengadaan, pemasaran, dan bahkan manajemen puncak. Akuntan tidak bisa bekerja sendiri karena sebagian informasi krusial berada di luar lingkup fungsi keuangan. Kebutuhan akan kerja sama antar departemen ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menambah tingkat kompleksitas dalam penerapan standar. Selain itu, banyak responden yang merasa bahwa ketentuan dalam PSAK 72 dan PSAK 73 masih terlalu umum atau abstrak, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap konteks masing-masing perusahaan. Hal ini berbeda dengan standar lama yang cenderung memberikan panduan yang lebih rigid dan spesifik. Akibatnya, akuntan harus membuat banyak interpretasi yang bisa berbeda antar perusahaan atau bahkan antar individu dalam perusahaan yang sama.

Dalam wawancara dengan beberapa responden, muncul keluhan bahwa tidak adanya studi kasus yang cukup dari perusahaan menengah membuat mereka kesulitan untuk membandingkan dan mencari referensi implementasi yang relevan. Sebagian besar literatur dan pelatihan yang tersedia lebih ditujukan untuk perusahaan besar atau multinasional yang memiliki sumber daya dan sistem yang lebih canggih. Padahal karakteristik perusahaan menengah, baik dari sisi struktur



organisasi maupun teknologi informasi, sangat berbeda. Responden juga menyampaikan bahwa keterbatasan perangkat lunak akuntansi menjadi hambatan besar dalam mengimplementasikan standar ini dengan baik. Beberapa sistem lama belum mendukung pencatatan otomatis untuk PSAK 73, seperti pengakuan aset hak guna dan amortisasi kewajiban sewa secara periodik. Hal ini membuat akuntan harus mengandalkan spreadsheet manual, yang tentu meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan memperpanjang waktu penyusunan laporan keuangan. Dari sisi beban kerja, para akuntan merasa bahwa implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 menambah tugas administratif yang signifikan. Mereka harus melakukan identifikasi ulang terhadap seluruh kontrak yang ada, merevisi template perjanjian, serta membuat dokumentasi atas setiap pertimbangan akuntansi yang diambil. Proses ini memerlukan waktu, energi, dan konsentrasi yang tinggi, sementara tidak semua perusahaan memberikan alokasi sumber daya tambahan untuk mendukung proses ini (Susanto, A., 2018).

Selain kendala teknis dan administratif, muncul pula kekhawatiran atas kemungkinan ketidaksesuaian antara kebijakan akuntansi dengan strategi bisnis perusahaan. Misalnya, dalam upaya mengoptimalkan pelaporan keuangan, perusahaan kadang ingin mempercepat pengakuan pendapatan, sementara PSAK 72 justru memperketat aturan tersebut. Hal ini menimbulkan tekanan tersendiri bagi akuntan yang harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap standar dan ekspektasi manajemen. Walaupun kompleksitas implementasi PSAK 72 dan 73 cukup tinggi, sebagian akuntan justru melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Mereka merasa bahwa tantangan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem informasi akuntansi, meningkatkan kapasitas staf, serta memperkuat budaya kepatuhan dalam organisasi. Dengan dukungan yang tepat, kompleksitas ini bisa dikelola secara bertahap. Namun, perlu diakui bahwa persepsi terhadap kompleksitas ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang telah melakukan antisipasi sejak awal melalui pelatihan, workshop, dan pembentukan tim transisi cenderung memiliki persepsi yang lebih positif dan merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan implementasi. Sebaliknya, perusahaan yang baru mulai memahami standar ketika kewajiban implementasi sudah dekat akan merasa kewalahan dan cenderung mengalami hambatan yang lebih besar.

Kompleksitas implementasi juga berdampak pada konsistensi pelaporan antar periode. Karena standar ini baru, banyak akuntan yang masih dalam tahap belajar dan mencoba. Akibatnya, bisa terjadi perubahan kebijakan atau pendekatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan inkonsistensi dan melemahkan kredibilitas laporan keuangan, terutama jika tidak ada dokumentasi kebijakan akuntansi yang jelas dan tertulis. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa persepsi terhadap kompleksitas cenderung menurun seiring waktu, sejalan dengan meningkatnya pengalaman dan pemahaman akuntan terhadap PSAK 72 dan PSAK 73. Akuntan yang telah menjalani dua atau lebih periode pelaporan dengan standar baru ini mulai merasa lebih terbiasa, meskipun mereka tetap mengakui bahwa standar ini jauh lebih menantang dibandingkan dengan standar yang digantikannya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa persepsi akuntan terhadap kompleksitas implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di perusahaan menengah sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, dukungan organisasi, kesiapan sistem, dan ketersediaan referensi praktis. Meskipun kompleksitas tersebut nyata dan diakui secara luas, hal ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan strategi adaptasi yang tepat, perusahaan menengah dapat



bertransformasi untuk memenuhi tuntutan standar akuntansi yang lebih tinggi dan relevan dengan praktik global (Pratama, H. Y., & Rahmawati, I., 2020).

Persepsi Akuntan terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di Perusahaan Menengah.

Implementasi PSAK 72 di perusahaan menengah menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Standar ini menekankan pendekatan pengakuan pendapatan berbasis prinsip dengan lima langkah yang membutuhkan analisis lebih mendalam dibandingkan standar sebelumnya. Dalam konteks perusahaan menengah yang sering kali memiliki sumber daya manusia dan sistem yang terbatas, proses implementasi ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga memerlukan keterampilan teknis dan penilaian profesional yang mumpuni. Salah satu tantangan utama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan secara formal dan terdokumentasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 72 mensyaratkan bahwa pengakuan pendapatan harus berbasis kontrak yang memiliki hak dan kewajiban jelas. Namun, di perusahaan menengah, kontrak sering kali tidak disusun secara terstruktur, bahkan ada transaksi yang hanya didasarkan pada pemesanan melalui email atau percakapan informal. Hal ini menyulitkan akuntan dalam menilai apakah suatu transaksi memenuhi kriteria kontrak menurut PSAK 72. Selain itu, menentukan kewajiban pelaksanaan secara terpisah dari satu kontrak menjadi hal yang cukup rumit. Misalnya, dalam industri distribusi atau jasa, satu kontrak bisa mencakup berbagai layanan atau produk. Akuntan harus mengevaluasi apakah setiap komponen tersebut dapat dipisahkan dan diakui pendapatannya secara terpisah, atau harus digabungkan sebagai satu kewajiban pelaksanaan. Tanpa pedoman internal yang jelas, penilaian ini sangat subjektif dan berisiko menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan.

Penentuan harga transaksi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktiknya, perusahaan sering memberikan diskon, insentif, atau bonus yang belum tentu tercatat secara eksplisit dalam kontrak. PSAK 72 mengharuskan semua unsur yang memengaruhi harga transaksi dihitung dan dialokasikan secara proporsional ke kewajiban pelaksanaan. Proses ini memerlukan sistem pencatatan yang rinci serta koordinasi erat antara bagian keuangan, penjualan, dan kontrak. Mengalokasikan harga transaksi ke masing-masing kewajiban pelaksanaan merupakan tahap berikutnya yang tidak kalah menantang. PSAK 72 menuntut penggunaan harga jual stand-alone yang sering kali tidak tersedia dalam sistem perusahaan menengah. Akibatnya, akuntan harus membuat estimasi yang masuk akal berdasarkan data historis atau pembandingan, yang tentu saja membuka ruang untuk perbedaan interpretasi dan potensi kesalahan penilaian. Akuntan juga menghadapi kesulitan dalam menentukan saat pengakuan pendapatan, apakah pada saat atau sepanjang waktu. Banyak transaksi bersifat progresif, seperti jasa instalasi atau proyek pengembangan sistem. PSAK 72 mengharuskan akuntan mengevaluasi apakah kriteria untuk pengakuan sepanjang waktu terpenuhi. Evaluasi ini membutuhkan data pendukung yang memadai dan metode pengukuran kemajuan proyek yang andal, yang sering kali belum tersedia di perusahaan menengah.

Selanjutnya, terdapat tantangan dalam pengumpulan data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk menerapkan PSAK 72 secara konsisten. Perusahaan menengah umumnya belum memiliki sistem ERP atau software akuntansi yang canggih, sehingga data transaksi, kontrak, dan perubahan harga tersebar di berbagai bagian dan tidak terdigitalisasi. Hal ini membuat proses penyesuaian data



untuk keperluan pelaporan menjadi sangat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Tantangan berikutnya berkaitan dengan edukasi dan pelatihan. Banyak akuntan di perusahaan menengah belum mendapatkan pelatihan intensif mengenai PSAK 72. Mereka belajar melalui membaca sendiri atau mengikuti seminar singkat. Keterbatasan akses terhadap pelatihan yang mendalam membuat pemahaman terhadap standar ini tidak merata. Akibatnya, interpretasi atas ketentuan PSAK 72 bisa sangat beragam, bahkan antar individu dalam perusahaan yang sama. Dari sisi manajerial, tidak semua pimpinan perusahaan memahami urgensi implementasi PSAK 72. Beberapa manajer beranggapan bahwa standar baru ini tidak membawa dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Ketidaksadaran ini menyebabkan kurangnya dukungan dari level atas, baik dalam bentuk anggaran pelatihan, penyediaan sumber daya, maupun kebijakan penyesuaian sistem informasi akuntansi. Padahal, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak.

Kesulitan juga muncul ketika akuntan harus menyesuaikan laporan keuangan lama dengan standar baru, terutama pada saat transisi awal. PSAK 72 memberikan pilihan metode retrospektif penuh atau modifikasi retrospektif. Masing-masing metode memiliki implikasi teknis yang berbeda dan memerlukan rekonstruksi data historis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Proses ini sangat memakan waktu dan sering kali tidak memungkinkan dilakukan secara menyeluruh akibat terbatasnya dokumentasi masa lalu. Dalam beberapa kasus, perusahaan merasa ragu apakah harus melakukan perubahan signifikan terhadap sistem dan prosedur internal hanya demi memenuhi ketentuan PSAK 72. Misalnya, ada keraguan dalam mengubah pola pengakuan pendapatan dari saat tagihan dikirim menjadi saat kewajiban pelaksanaan selesai. Perubahan ini memerlukan revisi pada SOP (Standard Operating Procedures), yang tidak selalu mudah diterima oleh bagian operasional. Tantangan lainnya adalah kurangnya panduan teknis atau contoh kasus yang aplikatif dari otoritas atau asosiasi profesi. Akuntan di perusahaan menengah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan panduan dalam bentuk studi kasus atau template penyesuaian kebijakan akuntansi. Tanpa referensi yang jelas, mereka hanya mengandalkan judgement yang tidak selalu sejalan dengan standar regulator atau auditor eksternal.

Dari perspektif teknologi, sebagian besar perusahaan menengah masih menggunakan sistem manual atau semi-digital. Hal ini membuat penerapan PSAK 72 yang menuntut pelacakan komponen kontrak dan alokasi pendapatan secara detil menjadi sulit dilakukan. Akuntan harus bekerja ekstra untuk menyusun spreadsheet tambahan, yang tidak hanya rawan kesalahan, tetapi juga tidak efisien secara waktu. Selain tantangan teknis dan sistemik, terdapat pula beban psikologis bagi akuntan. Mereka merasa khawatir jika interpretasi yang mereka buat keliru dan berdampak pada opini auditor atau bahkan berujung pada sanksi regulasi. Kekhawatiran ini diperparah dengan tidak adanya tempat konsultasi resmi yang mudah diakses dan cepat merespons, sehingga akuntan sering merasa bekerja dalam ketidakpastian. Meskipun tantangan-tantangan ini nyata dan cukup signifikan, terdapat pula harapan bahwa proses adaptasi ini akan memperkuat kualitas pelaporan keuangan dalam jangka panjang. Beberapa perusahaan mulai menyadari pentingnya pembaruan sistem dan pelatihan berkelanjutan agar penerapan PSAK 72 menjadi lebih mulus. Adaptasi mungkin berjalan lambat, tetapi seiring waktu dan dukungan yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.



Persepsi Akuntan terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di Perusahaan Menengah

Penerapan PSAK 73 tentang sewa menjadi tantangan besar bagi perusahaan menengah, terutama karena perubahan mendasar dalam cara pengakuan transaksi sewa di laporan keuangan. Salah satu tantangan paling signifikan adalah penghapusan klasifikasi antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dari sisi penyewa. Kini, semua jenis sewa diakui sebagai aset hak guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa, yang membutuhkan pendekatan akuntansi baru yang belum familiar bagi banyak praktisi di perusahaan menengah. Tantangan pertama muncul pada tahap identifikasi kontrak sewa. PSAK 73 mengharuskan perusahaan mengevaluasi seluruh perjanjian yang mungkin mengandung unsur sewa, tidak terbatas pada kontrak eksplisit seperti sewa gedung atau kendaraan. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kontrak yang berisi hak untuk mengendalikan penggunaan aset dalam jangka waktu tertentu. Banyak perusahaan menengah belum terbiasa dengan analisis semacam ini dan tidak memiliki alat bantu atau template evaluasi yang sesuai. Selain itu, penentuan masa sewa yang tepat sering kali menyulitkan. PSAK 73 mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan tidak hanya masa sewa minimum, tetapi juga opsi perpanjangan dan penghentian yang wajar diperkirakan akan digunakan. Di perusahaan menengah, dokumentasi dan kajian atas niat penggunaan jangka panjang terhadap aset sewaan sering kali tidak tersedia secara formal, sehingga akuntan terpaksa menggunakan penilaian subjektif tanpa dasar yang kuat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Masalah lainnya adalah keterbatasan pemahaman terhadap metode diskonto dan perhitungan nilai kini dari kewajiban sewa. PSAK 73 mengharuskan penggunaan tingkat diskonto implisit dalam sewa atau, jika tidak tersedia, tingkat pinjaman inkremental penyewa. Banyak perusahaan menengah tidak memiliki informasi suku bunga pinjaman yang relevan atau keahlian untuk menghitung nilai kini. Akibatnya, perhitungan sering kali dilakukan dengan asumsi yang kurang tepat atau bahkan keliru. Pencatatan aset hak guna dan kewajiban sewa juga memerlukan sistem akuntansi yang mendukung. Banyak perusahaan menengah masih menggunakan sistem manual atau software akuntansi dasar yang tidak mampu mencatat amortisasi aset hak guna dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa secara otomatis. Hal ini menyebabkan akuntan harus membuat perhitungan manual dan rekonsiliasi secara berkala, yang tentu saja meningkatkan risiko kesalahan dan beban kerja. Ketersediaan data historis juga menjadi kendala utama dalam implementasi awal PSAK 73. Untuk keperluan transisi, perusahaan harus mengidentifikasi kondisi sewa pada awal kontrak, termasuk nilai pembayaran, tanggal mulai sewa, dan opsi lainnya. Namun, di banyak perusahaan menengah, informasi ini tidak terdokumentasi dengan baik atau tersebar di berbagai departemen, seperti legal, pengadaan, dan keuangan, tanpa sistem sentralisasi (Saputra, R. A., & Lestari, P., 2022).

Kesulitan juga dirasakan dalam pengukuran kembali (remeasurement) kewajiban sewa yang terjadi jika ada perubahan dalam kontrak, misalnya modifikasi harga, masa sewa, atau ruang yang disewa. PSAK 73 mengharuskan entitas untuk menghitung ulang aset dan kewajiban sewa berdasarkan ketentuan baru. Proses ini cukup rumit dan memerlukan pemahaman yang kuat terhadap perubahan terms kontrak serta dampaknya terhadap pelaporan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menengah juga tidak memiliki tim khusus yang menangani akuntansi sewa. Akuntan umum dituntut untuk menguasai ketentuan PSAK 73 secara mandiri sambil tetap menjalankan tanggung jawab operasional lainnya. Beban ini menyebabkan keterlambatan dalam proses adopsi



serta ketidakkonsistenan dalam pencatatan antar periode, apalagi jika tidak disertai pelatihan yang memadai. Selain kendala teknis, terdapat pula resistensi dari pihak manajemen dan operasional terhadap perubahan yang dibawa PSAK 73. Beberapa pihak internal memandang bahwa pengakuan seluruh sewa sebagai liabilitas akan memperburuk rasio keuangan perusahaan, khususnya rasio utang terhadap aset, yang kemudian berdampak pada persepsi investor atau bank. Hal ini menimbulkan tekanan kepada akuntan untuk mencari “jalan tengah,” bahkan berpotensi menyimpang dari prinsip akuntansi yang benar.

Kurangnya panduan teknis yang aplikatif untuk konteks perusahaan menengah menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar literatur dan contoh implementasi PSAK 73 berasal dari perusahaan besar yang memiliki sistem dan personel profesional yang lengkap. Akuntan perusahaan menengah merasa kesulitan untuk menyesuaikan panduan tersebut dengan kondisi riil mereka yang lebih sederhana dan terbatas dari sisi sumber daya. Kesulitan juga terjadi dalam menentukan aset mana yang perlu dimasukkan dalam cakupan PSAK 73. Misalnya, dalam beberapa kasus, perusahaan menengah memiliki perjanjian penyewaan dengan pihak berelasi atau menyewa sebagian kecil dari aset (seperti ruang kantor bersama). Menentukan apakah hak penggunaan atas bagian aset tersebut dapat diukur secara terpisah dan diakui sebagai aset hak guna menjadi perdebatan tersendiri, terutama ketika tidak ada acuan harga atau masa sewa yang eksplisit. Dalam hal audit, tantangan bertambah ketika auditor meminta dokumentasi formal atas semua pertimbangan yang dibuat perusahaan terkait PSAK 73. Bagi perusahaan menengah yang belum terbiasa mendokumentasikan pertimbangan profesional secara sistematis, ini menjadi beban tambahan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memerlukan pertanggungjawaban teknis yang mendalam.

Transisi awal dari PSAK 30 ke PSAK 73 juga tidak selalu didukung oleh perubahan kebijakan internal yang menyeluruh. Misalnya, kebijakan pengadaan sewa belum diperbarui untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan. Akibatnya, meskipun standar baru telah diterapkan, belum terjadi perubahan perilaku atau strategi bisnis yang sejalan, sehingga manfaat implementasi PSAK 73 menjadi kurang optimal. Secara umum, tantangan implementasi PSAK 73 di perusahaan menengah sangat kompleks karena menyangkut aspek teknis, sistem, kebijakan, dan budaya organisasi. Akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan interpretatif yang tinggi serta koordinasi lintas fungsi yang erat. Tanpa dukungan dari manajemen puncak dan investasi dalam pelatihan serta sistem informasi, implementasi PSAK 73 akan berjalan setengah hati dan berisiko menimbulkan kesalahan pelaporan. Meskipun demikian, ada juga perusahaan menengah yang memandang tantangan ini sebagai peluang untuk memperbaiki pengelolaan kontrak sewa dan meningkatkan transparansi pelaporan. Beberapa perusahaan bahkan mulai mengembangkan modul sederhana dalam sistem mereka untuk mencatat transaksi sewa sesuai PSAK 73 (Dewi, A. R., & Nugroho, A. B., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi bertahap dan kemauan beradaptasi, tantangan implementasi PSAK 73 dapat diatasi secara progresif.

Persepsi Akuntan terhadap Tingkat Kesulitan Implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di Perusahaan Menengah.

Perbandingan antara implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di perusahaan menengah menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menghadirkan tantangan signifikan, tetapi dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Akuntan menghadapi dua standar yang sama-sama baru dan kompleks,



tetapi dengan pendekatan teknis serta cakupan yang berbeda. PSAK 72 berfokus pada pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sedangkan PSAK 73 mengatur pengakuan sewa dari sisi penyewa. Perbedaan ini menciptakan jenis kesulitan yang beragam dalam implementasi praktisnya. Secara umum, PSAK 72 cenderung lebih abstrak dan membutuhkan banyak pertimbangan profesional dalam menafsirkan kontrak serta pengakuan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang berbasis prinsip, yang memerlukan lima langkah identifikasi dan evaluasi transaksi. Di sisi lain, PSAK 73 lebih bersifat prosedural, karena menuntut entitas untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan melakukan pencatatan aset dan liabilitas secara sistematis. Perusahaan menengah kerap kali lebih kesulitan dengan PSAK 72 karena banyaknya judgment yang dibutuhkan. PSAK 72 menguji kemampuan analisis akuntan dalam menguraikan satu kontrak menjadi kewajiban-kewajiban pelaksanaan yang terpisah, lalu mengalokasikan harga transaksi secara adil. Proses ini memerlukan data kontrak yang lengkap serta pemahaman atas karakteristik produk dan jasa perusahaan. Sebaliknya, PSAK 73 menuntut ketelitian dalam pengumpulan data keuangan dan non-keuangan, seperti nilai pembayaran sewa, masa sewa, dan opsi pembaruan kontrak, tetapi tidak menuntut analisis pemisahan transaksi sekompleks PSAK 72.

Dari sisi dokumentasi, tantangan PSAK 73 tampak lebih berat karena memerlukan rekam jejak perjanjian sewa yang lengkap dan terstruktur. Banyak perusahaan menengah tidak memiliki sistem yang mampu mendokumentasikan kontrak sewa secara digital dan terintegrasi. Hal ini menjadikan proses identifikasi dan pencatatan aset hak guna dan kewajiban sewa berjalan lambat dan rentan kesalahan (Susanto, A., 2018). Sementara itu, PSAK 72 lebih menekankan pada dokumentasi analisis dan pertimbangan profesional, yang meski penting, sering kali diabaikan atau kurang terdokumentasi dengan baik. Tingkat kesulitan juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem informasi akuntansi. PSAK 73 sangat bergantung pada sistem yang mampu menghitung amortisasi aset hak guna dan bunga kewajiban sewa secara otomatis. Banyak perusahaan menengah yang belum memiliki sistem tersebut dan masih mencatat transaksi sewa secara manual. Sementara pada PSAK 72, meskipun sistem yang canggih dapat membantu, banyak prosesnya yang masih bisa dilakukan secara manual melalui spreadsheet, asalkan akuntan memiliki pemahaman analitis yang baik. Dalam hal pelatihan dan pemahaman, sebagian besar responden penelitian menunjukkan bahwa mereka lebih familiar dengan konsep pendapatan karena telah digunakan dalam PSAK sebelumnya, meskipun ada perubahan signifikan pada PSAK 72. Sebaliknya, PSAK 73 benar-benar baru bagi sebagian besar akuntan karena menciptakan perlakuan akuntansi baru atas sewa yang sebelumnya tidak dicatat di neraca. Akibatnya, banyak akuntan merasa lebih 'asing' dengan PSAK 73 meskipun konsepnya lebih terstruktur.

Dari sudut pandang risiko pelaporan, kesalahan dalam implementasi PSAK 72 cenderung lebih sulit dideteksi karena berbasis judgment dan alokasi. Auditor atau regulator dapat memiliki penilaian yang berbeda atas kewajiban pelaksanaan atau harga transaksi. Sebaliknya, kesalahan dalam PSAK 73 lebih bersifat numerik dan terlihat jelas, seperti ketidaksesuaian antara jumlah aset hak guna dengan kewajiban sewa, atau ketidaksesuaian perhitungan diskonto, sehingga cenderung lebih cepat diketahui. Dalam praktik transisi awal, PSAK 73 lebih berat dari sisi dampak langsung terhadap laporan keuangan. Banyak perusahaan yang tidak terbiasa mencatat kewajiban sewa secara eksplisit dan tiba-tiba harus menyesuaikan neraca mereka dengan angka yang besar akibat kapitalisasi sewa. Ini berdampak langsung pada rasio keuangan, terutama leverage, yang dapat mempengaruhi hubungan dengan bank atau investor. Sementara PSAK 72 berdampak lebih besar



pada laporan laba rugi dan pengakuan pendapatan antar periode. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang tersedia, implementasi PSAK 72 memerlukan akuntan yang mahir dalam analisis transaksi dan kontrak, sementara PSAK 73 menuntut akuntan yang teliti dalam perhitungan keuangan dan pengelolaan kontrak jangka panjang. Artinya, tantangan PSAK 72 lebih bersifat kognitif dan interpretatif, sedangkan PSAK 73 lebih bersifat administratif dan teknis. Perusahaan menengah, yang sering kali hanya memiliki satu atau dua staf akuntansi, akan sangat terbebani oleh keduanya sekaligus.

Ada juga perbedaan dalam urgensi pengakuan perubahan kebijakan akuntansi kepada manajemen dan unit operasional. PSAK 72 menuntut kerja sama dari bagian pemasaran, kontrak, dan layanan pelanggan untuk menyusun kembali sistem penjualan yang sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan (Handayani, D., et al., 2022). Sebaliknya, PSAK 73 memerlukan koordinasi erat dengan departemen legal dan pengadaan yang biasanya mengelola kontrak sewa. Keduanya menimbulkan tantangan lintas-departemen yang membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda. Dalam hal persepsi akuntan, PSAK 72 dinilai lebih membingungkan karena fleksibilitasnya yang tinggi justru menciptakan ketidakpastian. Akuntan merasa terbebani karena harus membuat banyak estimasi dan pertimbangan yang bisa jadi berbeda dengan auditor atau regulator. Sebaliknya, PSAK 73 memberikan panduan yang lebih tegas meskipun memerlukan lebih banyak data kuantitatif. Karena itu, sebagian akuntan lebih “takut salah” dalam PSAK 72 tetapi lebih “capek teknis” dalam PSAK 73. Pengalaman awal implementasi menunjukkan bahwa perusahaan yang sebelumnya sudah mengelola data kontrak secara baik akan lebih mudah menerapkan PSAK 73, sedangkan perusahaan yang terbiasa dengan prinsip matching antara pendapatan dan biaya akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan PSAK 72. Oleh karena itu, latar belakang sistem dan budaya akuntansi perusahaan sangat memengaruhi persepsi terhadap tingkat kesulitan implementasi masing-masing standar.

Ketika dibandingkan dalam konteks pelaporan audit, banyak akuntan menyatakan bahwa PSAK 73 lebih sering menjadi perhatian utama auditor karena menyangkut pengakuan aset dan liabilitas. Auditor akan lebih ketat dalam memeriksa ketepatan perhitungan, nilai diskonto, dan masa sewa. Sebaliknya, PSAK 72 cenderung menjadi area perdebatan yang lebih subjektif antara akuntan dan auditor karena menyangkut pertimbangan profesional yang tidak bisa dinilai hanya dari angka. Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak ada standar yang sepenuhnya lebih mudah atau lebih sulit; keduanya memiliki tantangan tersendiri yang tergantung pada konteks dan kesiapan internal perusahaan. Namun, perusahaan menengah yang memiliki sistem dokumentasi dan koordinasi antar departemen yang lemah, cenderung lebih kesulitan dalam menerapkan PSAK 73 secara tepat waktu dan akurat. Di sisi lain, perusahaan yang belum terbiasa menyusun kontrak komprehensif dan terstruktur, akan lebih terganggu oleh kompleksitas PSAK 72. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi antara keterbatasan sumber daya, keterampilan teknis, dan sistem informasi menjadi akar utama dari persepsi tingginya kesulitan implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di perusahaan menengah. Diperlukan strategi implementasi bertahap, pelatihan berkelanjutan, serta peran aktif dari asosiasi profesi dan otoritas standar untuk membantu perusahaan menengah menghadapi tantangan tersebut secara efektif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 di perusahaan menengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Kesulitan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis dan sistem, tetapi juga dari kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan standar akuntansi. Perubahan paradigma dari pendekatan berbasis aturan ke pendekatan berbasis prinsip (dalam PSAK 72), serta pengakuan semua sewa sebagai liabilitas (dalam PSAK 73), menjadi dua beban besar yang harus dihadapi secara bersamaan oleh akuntan di lingkungan perusahaan menengah. PSAK 72 membawa tantangan dalam bentuk interpretasi kontrak, pengidentifikasian kewajiban pelaksanaan, dan alokasi harga transaksi. Banyak perusahaan menengah tidak memiliki sistem dokumentasi kontrak yang mendalam, sehingga akuntan harus melakukan banyak pertimbangan profesional dengan keterbatasan data. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dalam pengakuan pendapatan, dan berisiko menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan antar periode. Dalam banyak kasus, akuntan merasa tidak yakin apakah pendekatan mereka sudah sejalan dengan ekspektasi auditor maupun regulator. Di sisi lain, PSAK 73 menuntut pengakuan seluruh transaksi sewa sebagai aset dan liabilitas, yang berdampak langsung pada laporan posisi keuangan. Tantangan utama terletak pada identifikasi kontrak sewa, penentuan masa sewa, perhitungan diskonto, serta penyesuaian sistem akuntansi untuk mencatat amortisasi dan bunga. Perusahaan menengah yang masih bergantung pada pencatatan manual menghadapi kesulitan besar dalam mengadopsi perubahan ini secara tepat dan konsisten. Selain itu, keterbatasan dokumentasi kontrak juga menghambat proses transisi yang diharuskan oleh PSAK 73.

Dari sisi persepsi, akuntan menilai bahwa PSAK 72 lebih membingungkan karena sifatnya yang sangat interpretatif dan fleksibel. Mereka merasa bahwa kesalahan dalam PSAK 72 sulit dideteksi secara cepat, tetapi berisiko menimbulkan perbedaan pendapat dengan auditor. Sementara itu, PSAK 73 dinilai lebih teknis dan menuntut ketelitian tinggi, tetapi panduannya lebih jelas. Dalam hal ini, PSAK 72 lebih mengandalkan pemahaman konseptual, sedangkan PSAK 73 lebih mengandalkan akurasi data dan sistem pencatatan yang terkomputerisasi. Perusahaan menengah pada umumnya memiliki keterbatasan dalam sistem informasi, sumber daya manusia yang terbatas, dan proses internal yang belum terdigitalisasi. Hal ini menjadikan proses implementasi kedua standar tersebut lebih berat dibandingkan perusahaan besar yang memiliki infrastruktur dan dukungan teknologi yang lebih mapan. Akibatnya, proses adopsi di perusahaan menengah seringkali berjalan lambat, tidak menyeluruh, atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun tantangan tersebut signifikan, beberapa perusahaan menengah telah menunjukkan adaptasi yang progresif melalui pelatihan internal, konsultasi eksternal, dan pengembangan sistem yang sederhana namun efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dapat diatasi secara bertahap dengan komitmen yang kuat dari manajemen dan investasi pada penguatan kapasitas akuntansi. Penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel jika ditangani secara strategis. Dari analisis perbandingan, tidak dapat disimpulkan bahwa salah satu standar lebih sulit daripada yang lain secara mutlak. Tingkat kesulitan sangat bergantung pada konteks internal masing-masing perusahaan, jenis transaksi yang dominan, serta kesiapan dari tim akuntansi yang ada. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa PSAK 72 lebih membebani dari sisi analisis dan judgment, sedangkan PSAK 73 lebih berat dari sisi teknis dan dokumentasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, A. R., & Nugroho, A. B. (2021). Tantangan implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 pada perusahaan menengah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 112–125.
- Handayani, D., Yuliani, S., & Ramdhan, A. (2022). Studi empiris atas tantangan implementasi PSAK 72 dan 73 pada perusahaan skala menengah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 34–47.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 73: Sewa*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Panduan implementasi PSAK 72 dan PSAK 73 untuk entitas skala menengah*. Jakarta: IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting: IFRS edition (3rd ed.)*. Wiley.
- Pratama, H. Y., & Rahmawati, I. (2020). Analisis kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan PSAK 72 dan PSAK 73. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 56–67.
- Saputra, R. A., & Lestari, P. (2022). Pengaruh kompleksitas transaksi dan kapabilitas sistem terhadap implementasi PSAK baru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 15(3), 178–190.
- Susanto, A. (2018). *Sistem informasi akuntansi: Struktur, pengendalian, dan pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Suryani, E., & Sutrisno, T. (2021). Pengaruh faktor individual dan organisasi terhadap persepsi akuntan terhadap PSAK baru. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 245–261.